



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

RENCANA KERJA

P_APBD 2024

DINAS KESEHATAN

AREA PERKANTORAN PEMKAB BOJONEGORO

Jl. dr. Cipto Bojonegoro



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN II PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan Tribulan II	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	30
3.1 Program dan Kegiatan	30
BAB IV PENUTUP	48

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya juga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Perubahan Renja ini merupakan satu dokumen dalam merencanakan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

Yang digambarkan dalam Rencana Kerja (Renja) adalah mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja, Evaluasi Perubahan Renja Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikian dokumen ini disusun dan disampikan, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOJONEGORO



dr. ANI PUJININGRUM, M. Kes

Pembina Tk I

NIP. 19731008 200312 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya

Renja Perubahan Dinas Kesehatan 2024

disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*health in all policies*). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah lain yang terkait dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan, serta forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
34. Peraturan Bupati 10A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rankir Renja Perubahan adalah untuk:

- 1) Memberikan gambaran perubahan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rankir Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah:

- 1) Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024;
- 3) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Kesehatan;
- 4) Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah;
- 5) Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan pada tahun 2024;
- 6) Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat;

- 7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rankir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Triwulan II;
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bab ini disajikan tentang rencana kerja berupa perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak disertai pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI TRIWULAN II PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro adalah penjabaran perencanaan tahunan sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro adalah perencanaan lima tahunan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro menyajikan dasar pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pengukuran kinerja tujuan dan sasaran dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 s.d triwulan II dan target tahun 2024.

Laporan kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu; pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, yaitu :

1. Menurunnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, dan Meningkatnya Status Gizi Balita;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024, melaksanakan 5 program, 24 kegiatan dan 92 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.372.486.059.313,- , dengan realisasi sampai dengan akhir Juni sebesar Rp. 382.422.434.132, 47,- atau sebesar 27,85% .

Dalam pelaksanaan, program dan kegiatan diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa permasalahan dan hambatan, adapun masalah dan hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan target program kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/140/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 yang mana data tersebut merupakan data proyeksi, sehingga target tersebut dalam pelaksanaanya sulit terpenuhi.
2. Kurang cermatnya dalam penyusunan tahapan pelaksanaan eksekusi belanja sehingga realisasi kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan sampai dengan triwulan II tahun 2024.
3. Beberapa paket pekerjaan terkait dengan pekerjaan fisik masih dalam proses tender sehingga realisasi anggarannya masih rendah.
4. Beberapa kegiatan dalam pelaksanaanya masih mengalami beberapa hambatan, baik dari segi teknis maupun administrasi seperti pelaksanaan fisik Puskesmas Ngraho RSUD Kepohbaru tidak dapat dilaksanakan.
5. Adanya perubahan mapping rekening belanja BOK Puskesmas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317

Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. Pendapatan RSUD yang belum tercapai sehingga diperlukan penyesuaian di P-APBD.

Beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Perlunya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.
2. Pelaksanaan paket lelang tepat waktu, dan perlunya koordinasi lintas sektor untuk memenuhi target indikator sasaran.
3. Perlunya penataan kembali terhadap desain rancangan APBD 2024 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien.
4. Perlu untuk melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan melalui dukungan penganggaran dengan pendekatan efektif dan efisien dengan mendukung capaian output yang berkualitas.
5. Melakukan pergeseran rekening belanja agar dapat segera dilakukan penyerapan.
6. Melakukan penyesuaian anggaran di P-APBD.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dinas Kesehatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2024
TRIWULAN II
KABUPATEN BOJONEGORO

Nama Perangkat Daerah: DINAS KESEHATAN

KODE REKENING					Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
							Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
DINKES								626.167.009.328		85.578.417.457		82.527.323.702
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	145.613.829.632	25%	30.583.664.285	50%	37.227.740.288
1	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jenis program dan laporan yang disusun sesuai kebutuhan	100%	430.644.059	25%	31.191.500	50%	22.231.100
1	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	11.396.419	3 dokumen	2.055.300	5 Dokumen	1.470.400
1	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	3 Dokumen	72.082.800	-	25.663.800	1 Dokumen	12.807.500
1	2	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 dokumen	12.870.800	-	-	2 dokumen	6.030.000
1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39 laporan	39.455.400	12 dokumen	-	9 laporan	1.923.200
1	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi/pelaporan kinerja yang disusun	7 laporan	294.838.640	2 dokumen	3.472.400	2 Dokumen	-
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	100%	137.630.176.487	100%	30.050.594.253	100%	35.157.448.005
1	2	1	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.627 ASN	135.252.525.387	1.020 org/bln	29.568.549.511	1.566 ASN	34.806.531.588
1	2	1	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	2.377.651.100	1 dokumen	482.044.742	316 orang	550.916.417
1	2	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pencatatan BMD sesuai pengadaan tahun berjalan	100%	79.040.000	100%	11.593.000	100%	6.320.000
1	2	1	02.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	79.040.000	1 laporan	11.593.000	1 laporan	6.320.000
1	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	12 laporan	471.688.779	-	12.449.900	4 laporan	51.980.600
1	2	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan data kepegawaian	4 dokumen	154.422.405	1 dokumen	4.409.900	2 dokumen	26.760.600
1	2	1	02.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilakukan	5 dokumen	66.447.645	2 dokumen	8.040.000	1 dokumen	-
1	2	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 dokumen	210.870.300	2 dokumen	-	2 dokumen	25.220.000
1	2	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 orang	39.948.429	-	-	0	-
1	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	8 Laporan	3.233.434.052	2 laporan	176.878.478	2 Laporan	1.661.183.840
1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	2.508.779.148	6 paket	94.700.000	0 paket	1.575.491.039

KODE REKENING					Unsur/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
					Kinerja	Keuangan			Kinerja	Keuangan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 paket	97.180.400	2 paket	16.200.900	2 paket	18.508.600
1	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	62.579.750	2 paket	20.830.100	1 paket	-
1	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 laporan	21.214.700		-	0 laporan	-
1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	543.680.054	36 laporan	45.147.478	40 laporan	67.184.201
1	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	4 jenis	2.378.749.548	1 jenis	215.307.954	1 jenis	247.597.193
1	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	790.239.498	3 laporan	159.951.144	4 laporan	94.786.994
1	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jenis jasa layanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	1.588.510.050	1 laporan	55.356.810	0 laporan	152.830.199
1	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	1.390.096.707		85.649.200	1 jenis	80.979.550
1	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	33 unit	834.483.200	9 unit	83.984.200	11 unit	55.105.350
1	2	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	5.000.000		-	0 unit	-
1	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	312.048.600	1 unit	1.665.000	0 unit	23.735.700
1	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	238.584.907	-	-	2 unit	2.138.500
1	2	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			473.870.277.454	97,87%	54.540.904.449		44.637.434.077
1	2	2	02		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan obat sesuai standar	100%	200.222.482.425		242.751.286		3.970.182.451
						Persentase fasilitas kesehatan dengan alkes sesuai standar	100%					
						Persentase fasilitas kesehatan dengan sarpras sesuai standar	100%					
5	1	2	02.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah RS baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1: 1000	2 unit	123.819.823.474		-	2 unit	-
1	2	2	02.01	2	Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	2 unit	14.704.593.980		98.618.250	2 unit	213.639.626
1	2	2	02.01	6	Pengembangan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan pengembangan	3 unit	1.005.449.400		2.269.400	3 unit	46.409.026
1	2	2	02.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas	Jumlah puskesmas yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	3 unit	644.585.016		160.000	2 unit	40.634.410
1	2	2	02.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang difasilitasi rehabilitasi dan pemeliharaan	2 unit	2.028.261.000		-		110.382.588
1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang difasilitasi Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mediknya	220 unit	44.505.555.332		38.251.384	23 unit	1.987.041.765
1	2	2	02.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang difasilitasi pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik nya	99 unit	1.284.638.000		-		-
1	2	2	02.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	92 paket	12.429.776.223		103.452.272		1.572.075.036
01	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	272.755.652.089	22,41%	54.215.615.563	43,18%	40.382.923.178

KODE REKENING	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
			Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%		24,01%		48,31%	
		Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		23,41%		48,37%	
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%		23,78%		51,80%	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		34,62%		60,97%	
		Persentase Warga Negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%		18,70%		60,75%	
		Persentase Cakupan KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR)	70%		70%		72,16%	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		38,30%		54,78%	
		Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		15,80%		49,99%	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		27		79,53%	
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100		100,00%	
		Persentase orang dengan TB mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%		44,2		72,32%	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%		22,4		61,60%	
		Persentase kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditemukan dan ditangani	100%		20,89		20,89%	
		Persentase Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100%		100		100,00%	
		Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	11,5%		3,21		6,26%	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	91,8%		47,97		94,04%	
		Persentase Pos UKK yang difasilitasi	42%		40,74		40,74%	
		Persentase anak SD usia 10-12 tahun dan ASN yang dilakukan pengukuran kebugaran	22%		2,87		3,17%	
		Persentase Desa/Kelurahan ODF	100%		100		100,00%	
		Persentase Fasyankes yang menyediakan layanan promosi kesehatan kategori cukup	80%		22,86		28,21%	
		Persentase tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional yang memiliki ijin serta kelompok asuhan mandiri yang terbentuk	21%		5		12,00%	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus (gilut dan indera)	100%		100		100,00%	
		Persentase Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita	100%		20,83		43,52%	
		Persentase Penanganan penderita diare	90%		20,6		68,90%	

KODE REKENING					Unsur/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
									Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Prevalensi kasus kusta	<1/ 10.000 penduduk		0,33		0,63	
						Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani	100%		100		100%	
						Kejadian Malaria per 1000 orang	<1 /tdk adakasukus indigenous		0		<1 /tdk adakasukus indigenous	
						Persentase Penduduk Peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJ) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah	30%		30		34,44	
						Persentase fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan kegiatanawatdaruratan terpadu	100%		100		100%	
1	2	2	02.02	1	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	16.745 orang	328.887.000	3.450 orang	-	3.478 orang	-
1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan pelayanan persalinan	15.984 orang	34.682.600	3.487 orang	-	3.883 orang	8.115.000
1	2	2	02.02	3	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.223 orang	1.992.879.900	3.564 orang	11.821.500	3.800 orang	223.289.500
1	2	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	62.884 orang	150.512.620	14.954 orang	-	17.621 orang	
1	2	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	139.872 orang	31.787.500	50.487 orang	1.500.000	38.431 orang	
1	2	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	799.594 orang	477.355.282	150.466 orang	10.209.000	337.858 orang	26.948.700
				7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	198.428 orang	35.281.100	82.578 orang	-	35.512 orang	4.180.000
1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	388.371 orang	21.132.990	61.339 orang	10.359.192	132.801 orang	
1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.445 orang	2.927.462.550	6.341 orang	13.833.500	12.316 orang	70.012.000
1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	2.518 orang	47.494.100	2.518 orang	7.620.000	2.518 orang	
1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	13.914 orang	964.668.798	4.043 orang	13.787.000	6.232 orang	36.525.000
1	2	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20.712 orang	148.211.663	4.666 orang	6.000.000	8.191 orang	40.663.463
1	2	2	02.02	13	Pengolahan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen	176.595.580	-	56.764.000	0	27.859.000
1	2	2	02.02	14	Pengolahan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen	12.609.525	-	-	0	
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 dokumen	28.662.479.352	1 dokumen	5.185.000	1 dokumen	11.645.000
1	2	2	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 dokumen	211.279.500	1 dokumen	46.830.000	1 dokumen	25.894.600
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	1.340.419.641	1 dokumen	17.438.104	1 dokumen	18.914.408

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
									Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 dokumen	663.738.294	1 dokumen	67.765.000	2 dokumen	24.163.750
1	2	2	02.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 dokumen	104.523.025	1 dokumen	5.850.000	1 dokumen	47.075.000
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	356.571.740	4 dokumen	54.014.700	3 dokumen	93.409.705
1	2	2	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.200 orang	19.400.000	2.461 orang	-	2.687 orang	
1	2	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 orang	55.618.000	-	-	0	
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 dokumen	3.613.491.648	1 dokumen	54.867.220	1 dokumen	211.620.672
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	205.763.124.510	3 dokumen	52.940.366.700	3 dokumen	35.553.545.800
1	2	2	02.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	105 orang	6.100.000	105 orang	-	105 orang	
1	2	2	02.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	60 paket	60.325.000	11 paket	168.874	8 paket	680.000
1	2	2	02.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 dokumen	551.876.116	-	3.588.962	1 dokumen	14.024.027
1	2	2	02.02	32	Operasional Pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen operasional Pelayanan RS	53 dokumen		15 dokumen		11 dokumen	
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	12 dokumen	21.892.998.063	3 dokumen	773.943.066	3 dokumen	2.960.804.323
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas ke	6 dokumen	384.390.049	2 dokumen	38.990.778	2 dokumen	83.502.780
1	2	2	02.02	36	Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	23.730.250	-	-	0	
1	2	2	02.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 dokumen	26.360.000	6 dokumen	-	8 dokumen	
1	2	2	02.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	539.407.750	1 unit	45.037.000	0	69.515.900
1	2	2	02.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.851 orang	767.805.942	464 orang	-	322 orang	743.405.850
1	2	2	02.02	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (OD HIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20.587 orang	138.456.001	4.666 orang	19.375.967	72 orang	73.438.700
1	2	2	02.02	42	Pengelolaan pelayanan Kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.257 orang	44.680.000	5 orang	-	4 orang	
1	2	2	02.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	3 tatanan	50.000.000		10.300.000		
1	2	2	02.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
1	2	2	02.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen	129.316.000		-		13.690.000
1	2	2	02.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	503.682.892	25%	10.040.000	100%	208.118.000

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
									Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	2	02.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13 dokumen	503.682.892	3 dokumen	10.040.000	5 dokumen	208.118.000
1	2	2	02.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan rujukan yang hasil monitoring dan evaluasinya ditindaklanjuti	90%	388.460.048	90%	72.497.600	90%	76.210.448
						Persentase puskesmas yang mutunya baik	55,56%		55,56%		55,56%	
1	2	2	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3 unit	66.475.600	-	29.950.000	5 unit	-
1	2	2	02.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	35 unit	197.979.103	35 unit	24.379.600	0	50.281.960
1	2	2	02.04	4	Penyiapan Perumusan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9 dokumen	124.005.345	2 dokumen	18.168.000	3 dokumen	25.928.488
1	2	3			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang mengajukan rekomendasi ijin	49,18%	3.404.286.800	10,00%	143.811.623	11,95%	379.369.207
1	2	3	2	1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan penerbitan dan pencabutan ijin praktik tenaga kesehatan	100%	22.073.130	100%	4.507.048	100%	7.058.680
1	2	3	02.01	01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	22.073.130	3 dokumen	4.507.048	1 dokumen	7.058.680
1	2	3	2	2	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melakukan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	85%	1.461.126.923		114.110.446	1,86%	221.362.889
1	2	3	02.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	84 dokumen	101.372.153	9 dokumen	5.600.000	9 dokumen	8.280.000
1	2	3	02.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.339 orang	1.066.255.770	133 orang	104.601.446	145 orang	188.785.389
1	2	3	02.02	3	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai ijin praktik untuk melaksanakan praktik di fasyankes maupun praktik mandiri	12 dokumen	293.499.000	12 dokumen	3.909.000	4 dokumen	24.297.500
1	2	3	2	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat daerah Kab./Kota	Persentase Puskesmas yang melakukan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	50%	1.921.086.747		24.994.129	0,09%	150.947.638
1	2	3	02.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat daerah Kab./Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM	550 Nakes	1.921.086.747	-	24.994.129	40	150.947.638
1	2	4			Program sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum	Persentase sarana kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi perijinan	100%	783.818.175	20%	12.696.100	40%	82.580.630
1	2	4	02.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan rekomendasi ijin	100%	50.026.600		12.696.100	72%	- 3.600.000

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
					Kinerja	Keuangan			Kinerja	Keuangan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	4	02.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 dokumen	50.026.600	20 dokumen	12.696.100	16 dokumen	- 3.600.000
1	2	4	02.02		Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase penerbitan sertifikat Produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Kelas I	100%	11.309.000		-	0%	
1	2	4	02.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 dokumen	11.309.000		-	0	-
1	2	4	02.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			463.588.900		-		57.369.630
1	2	4	02.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			463.588.900				57.369.630
1	2	4	02.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memenuhi syarat dan diberikan sertifikat	84%	112.217.700	5,71%	-	7,71%	18.812.000
1	2	4	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	35 dokumen	112.217.700	2 dokumen		2 dokumen	18.812.000
1	2	4	02.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase puskesmas yang melaksanakan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	85.851.400	25,71%	-	45,71%	6.428.000
1	2	4	02.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	35 dokumen	85.851.400	9 dokumen	-	7 dokumen	6.428.000
1	2	4	02.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			60.824.575		-		3.571.000
1	2	4	02.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			60.824.575				3.571.000
1	2	5			Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	18%	2.494.797.267	18%	297.541.000	18%	200.199.500
						Persentase pondok pesantren yang memiliki Ponkestren	73%		73%		73%	

KODE REKENING					Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	5	02.02	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tk. Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Desa/ Kelurahan Siaga yang difasilitasi	100%	587.777.000	25%	51.241.000	50%	70.895.000
1	2	5	02.02	01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	4 dokumen	587.777.000	1 dokumen	51.241.000	1 dokumen	70.895.000
1	2	5	02.02	2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian PHBS dalam rumah tangga	72%	450.291.267		19.050.000	72%	91.750.000
1	2	5	02.02	02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 dokumen	419.201.000		19.050.000	1 dokumen	91.750.000
1	2	5	02.02	02.02	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan kesadaran kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			31.090.267		-		-
1	2	5	02.02	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa dengan Jumlah UKBM aktif > 4	85%	1.456.729.000		227.250.000	85%	37.554.500
1	2	5	02.02	03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dokumen	1.456.729.000	1 dokumen	227.250.000	1 dokumen	37.554.500
								398.503.043.197		43.860.405.582		72.964.223.775
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota			334.239.202.240		40.975.425.841,00		58.253.707.203
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			334.239.202.240		40.975.425.841,00		58.253.707.203
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		334.239.202.240		40.975.425.841,00		58.253.707.203
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota			64.263.840.957		2.884.979.741,00		14.710.516.572
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah			64.263.840.957		2.884.979.741,00		14.710.516.572
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		64.263.840.957		2.884.979.741,00		14.710.516.572
								102.915.112.026		8.423.578.109		25.211.135.846
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota			82.675.000.000		7.614.765.609,00		20.733.899.536
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			82.675.000.000		7.614.765.609,00		20.733.899.536
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		82.675.000.000		7.614.765.609,00		20.733.899.536
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota			20.240.112.026		808.812.500,00		4.477.236.310
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah			20.240.112.026		808.812.500,00		4.477.236.310
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20.240.112.026		808.812.500,00		4.477.236.310
								96.392.636.051		5.872.984.557		14.795.952.374
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota			82.481.721.467		5.193.957.287,00		11.396.379.895
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			82.481.721.467		5.193.957.287,00		11.396.379.895
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		82.481.721.467		5.193.957.287,00		11.396.379.895
1	2	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			-				
1	2	2	02		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			-				

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	2	02.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000						
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota			13.910.914.584		679.027.270,00		3.399.572.479
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah			13.910.914.584		679.027.270,00		3.399.572.479
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		13.910.914.584		679.027.270,00		3.399.572.479
RSUD KEPOHBARU								49.584.469.285		2.171.206.984		6.995.893.953
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan		18.668.148.100		240.304.609		1.215.695.292
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan		9.706.054.429		240.304.609,00		1.215.695.292
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		9.706.054.429		240.304.609,00		1.215.695.292
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			8.962.093.671		0		0
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		8.962.093.671		0		
1	2	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	IKM	3,38	30.916.321.185		1.930.902.375		5.780.198.661
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang disediakan sesuai standar	75%	8.737.785.604		0		760.532.128
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang layak fungsi	75%					
1	2	2	2.01	12	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Unit Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	5 unit					
1	2	2	2.01	13	Pengadaan prasana dan pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Unit Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	14 unit					
1	2	2	2.01	14	pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Unit Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	136 unit	5.285.010.909				52.269.999
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			225.973.800				
1	2	2	2.01	16	pengadaan obat, vaksin	Jumlah jenis Obat dan vaksin yang dilakukan diadakan	2 paket					
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan habis pakai yang diadakan	6 paket					
1	2	2	2.01	20	pemeliharaan rutin dan berkalaalat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dilakukan pemeliharaan Rutin dan Berkala	0 unit	892.930.000				
	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			2.333.870.895				708.262.129
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai kebutuhan	75%	22.178.535.581		1.930.902.375		5.019.666.533
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	75%	22.178.535.581		1.930.902.375		5.019.666.533

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
1					2	3	4	5	Kinerja 6	Keuangan 7	Kinerja 8	Keuangan 9
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			0				
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
PUSKESMAS								98.923.789.426		11.544.603.237		22.476.708.557
1	2	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi	100%	97.836.323.518		11.544.603.237		22.280.537.322
						IKM	3,34					
						AKI	90,91/100.000 KH					
						AKB	6,06/1.000 KH					
						Prevalensi Stunting	5,70%					
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	97.705.777.403		11.544.603.237		22.280.537.322
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100,00%					
						Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%					
						Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00%					
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%					
						Persentase Warga Negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100,00%					
						Persentase Cakupan KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR)	70%					
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00%					
						Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%					
						Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%					
						Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (OdenganJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%					
						Persentase orang dengan TB mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100,00%					
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100,00%					
						Persentase kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditemukan dan ditangani	100,00%					
						Persentase Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100,00%					
						Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	11,50%					
						Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	91,60%					
						Persentase Pos UKK yang difasilitasi	42%					

KODE REKENING					Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
1					2	3	4	5	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
						Persentase anak SD usia 10-12 tahun dan ASN yang dilakukan pengukuran kebugaran	22%					
						Persentase Desa/Kelurahan ODF	100%					
						Persentase Fasyankes yang menyediakan layanan promosi kesehatan kategori cukup	80%					
						Persentase tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional yang memiliki ijin serta kelompok asuhan mandiri yang terbentuk	21%					
						Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus (gilut dan indera)	100%					
						Persentase Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita	100%					
						Persentase Penanganan penderita diare	90%					
						Prevalensi kasus kusta	1/10.000 penduduk					
						Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani	100%					
						Kejadian Malaria per 1000 orang	1 kasus indigous					
						Persentase Penduduk Peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah	30,00%					
						Persentase fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan kegiatanawatderuratan terpadu	100%					
1	2	2	02.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.745 orang	1.694.251.000				467.140.500
1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.984 orang	1.173.997.468				256.848.000
1	2	2	02.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.223 bayi					
1	2	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62.884 balita					
1	2	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	139.872 orang	494.995.000				21.150.000
1	2	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	803.499 orang					
1	2	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198.428 orang					
1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	388.371 orang					
1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.445 orang					
1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.518 orang					
1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13.914 orang	154.834.400				39.939.000
1	2	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20.712 orang	5.625.000				150.000

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	2	02.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	35 dokumen					
1	2	2	02.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	35 dokumen					
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35 dokumen	5.575.084.288				85.334.000
1	2	2	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	35 dokumen					
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35 dokumen	380.706.077				89.237.188
1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	35 dokumen					
1	2	2	02.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	35 dokumen					
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35 dokumen	870.139.264				254.823.736
1	2	2	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4200 orang					
1	2	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 orang					
1	2	2	02.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 dokumen					
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35 dokumen	4.484.941.680				1.236.724.888
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35 dokumen					
1	2	2	02.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	105 orang					
1	2	2	02.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	60 paket					
1	2	2	02.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	35 dokumen					
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	35 dokumen	80.080.298.426		11.544.603.237		19.203.633.510
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	35 dokumen	7.572.000				1.262.000
1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota						
1	2	2	02.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	22.950.000				1.875.000
1	2	2	02.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 dokumen					

KODE REKENING					Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu		Realisasi Per Triwulan			
							Target Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II	
1					2	3	4	5	Kinerja 6	Keuangan 7	Kinerja 8	Keuangan 9
1	2	2	02.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit					
1	2	2	02.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang suda dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga Puskesmas						
1	2	2	02.02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.851 orang	136.575.000				31.410.000
1	2	2	02.02	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV(ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20.587 orang	38.925.000				8.925.000
1	2	2	02.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan malaria Sesuai Standar	1.257 orang					
1	2	2	02.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			467.030.000				72.734.000
1	2	2	02.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.117.852.800				509.350.500
1	2	2	02.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			130.546.115	0			0
1	2	2	02.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			130.546.115				
1	2	3			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar (jumlah dan kompetensi)	49,18%	-		-		-
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan terlatih	50%	-		-		-
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	550 orang					
1	2	5			Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	18%	1.087.465.908		0		196.171.235
						Persentase pondok pesantren yang memiliki Poskestren	73%					
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa /Kelurahan Siaga yang difasilitasi	100%	0		0		0
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	35 dokumen					
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa dengan Jumlah UKBM aktif > 4	85%	1.087.465.908		0		196.171.235
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35 dokumen	1.087.465.908				196.171.235
TOTAL BIDANG								1.372.486.059.313		157.451.195.926		224.971.238.207

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja bidang kesehatan ditandai pula melalui indikator SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Sebanyak 12 indikator dalam SPM, melingkupi pelayanan kesehatan dalam daur kehidupan (*Continuum of Care*) dan penanggulangan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Hasil capaian indikator SPM seperti terinci pada tabel berikut ini:

TABEL 2.2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	100%	100%	100%	88,49%	100,00%	100%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
3	Persentase setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	97,31%	100,00%	100%
4	Persentase setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	99,88%	100,00%	100%
5	Persentase setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	96,28%	100,00%	100%
6	Persentase warga negara usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	78,13%	100,00%	100%
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	78,89%	100,00%	100%
8	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	86,24%	100,00%	100%
9	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	93,71%	100,00%	100%
10	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	91,53%	100,00%	100%
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
12	Persentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%

Bojonegoro, Juli 2024

Sumber: Laporan LPPD Dinas Kesehatan



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir tahun 2023 semua indikator sudah tercapai 100%.

2.3 Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dengan berbagai pengamatan terhadap berbagai kondisi yang ada di Kabupaten Bojonegoro maka beberapa isu penting yang hendaknya mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Maternal berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Indikator AKI dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Setiap kehamilan, dalam perkembangannya mempunyai risiko mengalami penyulit atau komplikasi. Pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, sesuai standar terpadu untuk pelayanan antenatal yang berkualitas. Dalam rangka melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator yang di dalamnya ada indikator pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan bayi baru lahir, yang merupakan upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan

Angka Kematian Bayi (AKB). Sebagian besar kematian ini dapat dicegah melalui pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai, pertolongan persalinan yang bersih dan aman, serta pelayanan rujukan kebidanan/perinatal yang terjangkau pada saat diperlukan.

2) Sumber Daya Kesehatan

Perlu adanya peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik. Selain itu ketersediaan aset berupa lahan/tanah untuk pengembangan bangunan sarana kesehatan yang juga masih terbatas.

Penganggaran bidang kesehatan perlu ditingkatkan sehingga dapat disusun program dan kegiatan bidang kesehatan yang lebih baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan guna pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimum. Pembiayaan yang ada masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk program untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Ketersediaan sumber daya kesehatan tingkat Puskesmas belum optimal, belum terpenuhinya kompetensi, jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan yang belum merata, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi tentang ketenagaan kesehatan. Dan adanya mutasi petugas kesehatan/pengelola program yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas kesehatan atau pengelola program yang baru. Begitu juga anggaran untuk peningkatan mutu dan kompetensi pegawai masih terbatas. Beberapa kegiatan Pelatihan didanai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2024. Kendala yang ada saat ini adalah

bahwa pelaksana pelatihan (Balai Pelatihan Kesehatan Murnajati) tidak bisa memberikan pelatihan secara luring atau datang ke Bojonegoro.

Beberapa faktor-faktor pendorong tercapainya pembangunan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah:

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan penurunan stunting dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
2. Adanya upaya optimalisasi ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap pentingnya keberagaman pangan dan gizi bagi keluarga

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro 2024-2026. Adapun rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Sumber dana dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro dan dana Transfer Pusat yang terdiri dari :

- 1) [DANA UMUM] - Retribusi Daerah – LRA
- 2) [DANA UMUM] - Lain-lain PAD Yang Sah
- 3) [DANA UMUM] - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- 4) [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
- 5) [DANA KHUSUS] - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
- 6) [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
- 7) [DANA KHUSUS] - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 8) [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
- 9) [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
- 10)[DANA KHUSUS] - Pendapatan Bagi Hasil
- 11)[DANA KHUSUS] - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
- 12)[DANA KHUSUS] - Insentif Fiskal

13)[DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 mengacu pada program prioritas dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program dan pendanaan indikatif. Untuk tahun 2024, Dinas Kesehatan termasuk RSUD merencanakan akan melaksanakan 5 Program dan 24 kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
 - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat daerah Kab./Kota
4. Program sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - d. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - e. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - f. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

5. Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tk. Daerah Kabuapten/ Kota
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan anggaran yang secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN BOJONEGORO

Nama Perangkat Daerah: DINAS KESEHATAN

KODE REKENING		Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Rencana Tahun 2024					Rencana Tahun 2024								
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
DINKES									628.167.009.328				633.473.589.187		(12.400.876.480)		139.947.153.522		
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Perentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	Dinkes	100%	146.613.829.632		Perentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	Dinkes	100%	132.104.533.760		(13.509.295.872)	100%		
1	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase jenis program dan laporan yang diseusun sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	430.844.059	DBHM	Perentase jenis program dan laporan yang diseusun sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	430.860.059	DBHM	216.800	100%		
1	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	12 dokumen	11.366.419	DBHM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	12 dokumen	11.366.419	DBHM	-	12 dokumen		
1	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkes	3 dokumen	72.052.800	DBHM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkes	3 dokumen	72.822.300	DBHM	739.500	3 dokumen		
1	2	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkes	6 dokumen	12.870.800	DBHM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkes	6 dokumen	13.117.300	DBHM	248.500	6 dokumen		
1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	17 laporan	39.455.400	DBHM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	39 laporan	39.948.400	DBHM	493.000	39 laporan		
1	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	6 laporan	254.638.640	DBHM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	7 laporan	253.576.240	DBHM	(1.262.400)	7 laporan		
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah	Perentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan		100%	137.630.176.487		Perentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan		100%	123.806.388.308		(13.824.788.179)	100%		
1	2	1	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	1.627 org/bulan	135.252.525.387	DAU, DBH Pajak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	1.627 org/bulan	120.487.021.708	DAU, DBH Pajak	(14.765.503.679)	1.627 org/bulan		
1	2	1	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	3 dokumen	2.377.851.100	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	3 dokumen	3.318.366.800	DBHM	940.715.500	3 dokumen		
1	2	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase pencatatan BMD sesuai pengendalian tahun berjalan		100%	79.049.000		Perentase pencatatan BMD sesuai pengendalian tahun berjalan		100%	79.040.000		-	100%		
1	2	1	02.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	1 laporan	79.040.000	DBHM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	1 laporan	79.040.000	DBHM	-	1 laporan		
1	2	1	02.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diseusun	Dinkes	2 laporan	471.688.779	APBD	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diseusun	Dinkes	2 laporan	346.336.929	APBD	(126.348.850)	4 laporan		
1	2	1	02.06	3	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	4 dokumen	154.422.405	DBHM	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	4 dokumen	86.393.700	DBHM	(68.028.705)	4 dokumen		
1	2	1	02.06	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	5 dokumen	66.447.645	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	5 dokumen	54.259.200	DBHM	(12.188.445)	5 dokumen		
1	2	1	02.06	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	6 dokumen	210.870.300	DBHM	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	6 dokumen	164.736.600	DBHM	(46.131.700)	6 dokumen		
1	2	1	02.06	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	100 orang	39.948.429	DBHM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	100 orang	39.948.429	DBHM	-	100 orang		
1	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang diseusun	Dinkes	8 Laporan	3.233.434.062		Jumlah laporan administrasi umum yang diseusun	Dinkes	8 Laporan	3.875.589.063		742.155.011	8 Laporan		
1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	10 paket	2.506.779.148	DBHM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota,Se mu Kecamatan,S emua Kelurahan	10 paket	3.302.711.213	DBHM	793.932.065	10 paket		

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/Berkurang		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan								
										Rencana Tahun 2024					Rencana Tahun 2024								
										Lokasi					Lokasi								
										Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja								
										Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif								
										Sumber Dana					Sumber Dana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	6 paket	97.190.400	DBHM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	6 paket	97.190.400	DBHM	-	6 paket						
1	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	4 paket	62.579.750	DBHM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	4 paket	62.579.750	DBHM	-	4 paket						
1	2	1	02.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	2 laporan	21.214.700	DBHM	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	2 laporan	9.856.200	DBHM	(12.368.500)	2 laporan						
1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	150 laporan	543.680.054	DBHM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	150 laporan	504.242.100	DBHM	(39.437.954)	150 laporan						
1	2	1	02.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dinkes	4 jenis	2.379.749.548		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dinkes	4 jenis	2.586.320.794		206.571.246	4 jenis						-
1	2	1	02.06	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	12 laporan	790.239.498	DBHM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	12 laporan	796.406.498	DBHM	(1.633.000)	12 laporan						
1	2	1	02.06	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	2 laporan	1.586.510.050	DBHM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	2 laporan	1.796.914.296	DBHM	208.404.246	2 laporan						
1	2	1	02.06		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinkes	3 jenis	1.390.096.707		Jumlah jenis pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinkes	3 jenis	983.014.407		(607.082.300)	3 jenis						-
1	2	1	02.06	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	33 unit	894.483.200	DBHM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	33 unit	543.614.200	DBHM	(290.869.000)	33 unit						
1	2	1	02.06	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	20 unit	5.000.000	DBHM	Jumlah mebel yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan		-		(5.000.000)	20 unit						
1	2	1	02.06	8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	4 unit	312.048.900	DBHM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	4 unit	153.336.300	DBHM	(158.713.300)	4 unit						
1	2	1	02.06	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	3 unit	236.664.907	DBHM	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Se- mua Kecamatan, S- emua Kelurahan	3 unit	186.064.907	DBHM	(52.500.000)	3 unit						

KODE REKENING						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
							Rencana Tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Rencana Tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9	10				
1						2	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			473.870.277.484			486.629.630.485		21.759.353.031		139.800.478.332			
1						2	2	02		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan obat sesuai standar	100%	200.222.482.425	Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan obat sesuai standar	100%	217.967.886.875	17.735.404.550	100%	122.877.302.132				
										Persentase fasilitas kesehatan dengan akses sesuai standar	100%		Persentase fasilitas kesehatan dengan akses sesuai standar	100%			-	100%					
										Persentase fasilitas kesehatan dengan sprapras sesuai standar	100%		Persentase fasilitas kesehatan dengan sprapras sesuai standar	100%			-	100%					
6						1	2	02.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	119.860.280.974,00	DBHM, Pajak Rokok	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	139.375.389.315	DBHM, Pajak Rokok	19.525.108.341	2 unit	81.437.224.848
1						2	2	02.01	2	Pembangunan puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	19.004.336.480,00	DBHM, Pajak Rokok	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	13.805.715.428	DBHM, Pajak Rokok	(5.196.621.052)	2 unit	20.380.462.852
1						2	2	02.01	6	Pengembangan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi pengembangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	795.249.400,00	Dau tambahan, DBHM	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	795.249.400	Dau tambahan, DBHM	-	3 unit	
1						2	2	02.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi rehabilitasi dan pemeliharaannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	644.585.016,00	Dau tambahan, DBHM	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Ditakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	644.585.016	Dau tambahan, DBHM	-	3 unit	6.275.322.400
1						2	2	02.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang difasilitasi rehabilitasi dan pemeliharaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.708.061.000,00		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang difasilitasi rehabilitasi dan pemeliharaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.708.061.000		-		
1						2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 unit	44.505.555.332,00	Dau tambahan, DBHM, pajak rokok, DAK ftek	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170 paket	44.227.325.313	Dau tambahan, DBHM, pajak rokok, DAK ftek	(278.230.019)	170 paket	13.311.548.832
1						2	2	02.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 unit	1.284.638.000,00	DAU tambahan, DBHM	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 unit	1.488.670.500	DAU tambahan, DBHM	204.032.500	79 unit	1.472.743.200
1						2	2	02.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 paket	12.429.776.223,00	retribusi jasa umum, DAU bdkes, DAK non ftek, pajak rokok	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.912.891.003				24.288.523.375
01						02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	94%	272.755.652.089	-	-	-	-	276.864.678.970	4.108.026.481	100%	18.823.176.200		
										Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%			-	100%					
										Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			-	100%					
										Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%			-	100%					
										Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			-	100%					
										Persentase Warga Negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%		Persentase Warga Negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%			-	100%					
										Persentase Cakupan KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR)	70%		Persentase Cakupan KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR)	70%			-	70%					
										Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%			-	100%					

KODE REKENING	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Rencana Tahun 2024					Rencana Tahun 2024					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%			Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%			-	100%	
						Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%			Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%			-	100%	
						Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%			-	100%	
						Persentase orang dengan TB mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%			Persentase orang dengan TB mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%			-	100%	
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		100%			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		100%			-	100%	
						Persentase kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditemukan dan ditangani		100%			Persentase kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditemukan dan ditangani		100%			-	100%	
						Persentase Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan		100%			Persentase Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan		100%			-	100%	
						Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)		11,5%			Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)		11,5%			-	11%	
						Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif		91,6%			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif		91,6%			-	92%	
						Persentase Pos UKK yang difasilitasi		42%			Persentase Pos UKK yang difasilitasi		42%			-	43%	
						Persentase anak SD usia 10-12 tahun dan ASN yang dilakukan pengukuran kebugaran		22%			Persentase anak SD usia 10-12 tahun dan ASN yang dilakukan pengukuran kebugaran		22%			-	23%	
						Persentase Desa/Kelurahan ODF		100%			Persentase Desa/Kelurahan ODF		100%			-	100%	
						Persentase Fasyankes yang menyediakan layanan promosi kesehatan kategori cukup		80%			Persentase Fasyankes yang menyediakan layanan promosi kesehatan kategori cukup		80%			-	85%	
						Persentase tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional yang memiliki (jn serta kelompok asuhan mandiri yang terbentuk		21%			Persentase tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional yang memiliki (jn serta kelompok asuhan mandiri yang terbentuk		21%			-	22%	
						Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus (glut dan indra)		100%			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus (glut dan indra)		100%			-	100%	
						Persentase Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita		100%			Persentase Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita		100%			-	100%	
						Persentase Penanganan penderita diare		90%			Persentase Penanganan penderita diare		90%			-	90%	
						Prevalensi kasus kusta		<1/ 10.000 penduduk			Prevalensi kasus kusta		<1/ 10.000 penduduk			-	<1/ 10.000 penduduk	
						Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani		100%			Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani		100%			-	100%	
						Kejadian Malaria per 1000 orang		<1 Adk adekasus indigenous			Kejadian Malaria per 1000 orang		<1 Adk adekasus indigenous			-	<1 Adk adekasus indigenous	
						Persentase Penduduk Peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah		30%			Persentase Penduduk Peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah		30%			-	33,9%	
						Persentase fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan kegiatan awaldanurutan terpadu		100%			Persentase fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan kegiatan awaldanurutan terpadu		100%			-	100%	
1	2	2	02.02	1	Pengalokasian Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	16.745 orang	328.867.000	DAK non fisk, DBHM, DAU tambahan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	16.745 orang	300.129.000,00	DAK non fisk, DBHM, DAU tambahan	(26.756.000)	16.745 orang	441.756.000
1	2	2	02.02	2	Pengalokasian Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	15.984 orang	34.682.600,00	DAK non fisk, DBHM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	15.984 orang	34.682.600,00	DAK non fisk, DBHM	-	15.984 orang	55.687.400
1	2	2	02.02	3	Pengalokasian Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	16.365 orang	1.992.879.900,00	DAK non fisk, DBHM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	15.223 bayi	1.418.994.900,00	DAK non fisk, DBHM	(573.885.000)	15.223 bayi	688.964.500
1	2	2	02.02	4	Pengalokasian Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	63.864 orang	150.512.620,00	DAK non fisk, DBHM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	62.884 balita	48.841.902,00	DAK non fisk, DBHM	(103.670.718)	62.884 balita	50.581.600
1	2	2	02.02	5	Pengalokasian Pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	132.381 orang	31.787.500,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Semua Kab/Kota, Semarang, Kecamatan, S emua Kelurahan	139.872 orang	31.787.500,00		-	139.872 orang	42.618.300

KODE REKENING						Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan							Target Capaian Kinerja	
						Rencana Tahun 2024					Rencana Tahun 2024							Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	1 dokumen	953.738.294,00	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	5 dokumen	654.096.294,00	DBHM	(9.542.000)	5 dokumen		
1	2	2	02.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	1 dokumen	104.523.025,00	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	4 dokumen	104.523.025,00	DBHM	-	4 dokumen	128.472.800	
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	12 dokumen	356.571.740,00	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	12 dokumen	342.492.590,00	DBHM	(14.079.150)	12 dokumen		
1	2	2	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	36.810 orang	19.400.000,00	DBHM	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	4200 orang	19.400.000,00	DBHM	-	4200 orang		
1	2	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyyalguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	1 orang	55.618.000,00	DBHM	Jumlah Penyyalguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	1 orang	55.618.000,00	DBHM	-	1 orang		
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	3 dokumen	3.813.491.548,00	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	3 dokumen	3.895.491.548,00	DBHM	252.000.000	3 dokumen		
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	26 dokumen	205.763.124.510,00	DBHM, DAU tambahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	12 dokumen	209.940.328.910,00	DBHM, DAU tambahan	4.177.202.400	12 dokumen		
1	2	2	02.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	105 orang	6.100.000,00	DBHM	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	105 orang	6.100.000,00	DBHM	-	105 orang		
1	2	2	02.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Speemen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Persentase Speemen Penyakit Potensial KLB diambil dan dikirim Ke Laboratorium Rujukan Nasional	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	100%	60.325.000,00	DBH Pajak +DAK NON FISIK	Persentase Speemen Penyakit Potensial KLB diambil dan dikirim Ke Laboratorium Rujukan Nasional	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	100%	60.325.000,00	DBH Pajak +DAK NON FISIK	-	100%		
1	2	2	02.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	1 dokumen	551.876.116,00	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	2 dokumen	342.458.616,00	DBHM	(209.417.500)	2 dokumen		
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	35 Puskesmas	35 dokumen	21.862.598.053,00	DBHM, PAD	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	35 Puskesmas	12 dokumen	21.808.286.822,00	DBHM, PAD	(284.711.141)	12 dokumen		
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Labkeada	2 dokumen	384.390.049,00	DBHM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Labkeada	6 dokumen	474.442.171,00	DBHM	90.052.122	6 dokumen		
1	2	2	02.02	36	Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (kejadian iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian iktan Pasca imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	1 laporan	23.730.250,00	DBHM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian iktan Pasca imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	1 laporan	18.450.250,00	DBHM	(5.280.000)	1 laporan		
1	2	2	02.02	37	Pelaksanaan Kecepatan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kecepatan Dini dan Respon Wabah	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	1 dokumen	26.360.000,00	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kecepatan Dini dan Respon Wabah	Semua Kab/Kota, Se- mu- Kecamatan, S- emua Kelurahan	52 dokumen	26.360.000,00	DBHM	-	52 dokumen		

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024	Rencana Tahun 2024

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Rencana Tahun 2024				Sumber Dana	Rencana Tahun 2024							
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3			3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang mengajukan rekomendasi Ijin	Dinkes	48,18%	3.404.288.800	APBD	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang mengajukan rekomendasi Ijin	Dinkes	48,18%	3.404.288.800	APBD	-	48,18%	-
1	2	3	2	1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan penerbitan dan pencabutan Ijin praktik tenaga kesehatan	Dinkes	100%	22.073.130		Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan penerbitan dan pencabutan Ijin praktik tenaga kesehatan	Dinkes	100%	22.073.130		-	100%	-
1	2	3	02.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	22.073.130	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	22.073.130	DBHM	-	3 dokumen	
1	2	3	2	2	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melakukan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	Dinkes	85%	1.481.126.923		Persentase Puskesmas yang melakukan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	Dinkes	85%	1.481.126.923		-	85%	-
1	2	3	02.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemasaran SDM	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemasaran Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 dokumen	101.372.153	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemasaran Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 dokumen	101.372.153	DBHM	-	42 dokumen	
1	2	3	02.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.339 orang	1.066.256.770	DBHM	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.339 orang	1.066.256.770	DBHM	-	1.339 orang	
1	2	3	02.02	3	Pembinaan dan Pengawasan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	293.499.000	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	293.499.000	DBHM	-	12 dokumen	
1	2	3	2	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat daerah Kab./Kota	Persentase Puskesmas yang melakukan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	90%	1.921.086.747		Persentase Puskesmas yang melakukan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	90%	1.921.086.747		-	90%	-
1	2	3	02.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat daerah Kab./Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550 orang	1.921.086.747	DBHM, DAK non fisk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550 orang	1.921.086.747	DBHM, DAK non fisk	-	550 orang	
1	2	4			Program sedian farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minum	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi perijinan		100%	783.818.175		Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi perijinan		100%	874.534.875		90.716.400	100%	148.875.190,00
1	2	4	02.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan rekomendasi Ijin		100%	50.026.800		Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan rekomendasi Ijin		100%	50.026.800		-	100%	-
1	2	4	02.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 dokumen	50.026.800	DBHM	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 dokumen	50.026.800	DBHM	-	50 dokumen	-
1	2	4	02.02		Kegiatan Pemberian Sertifikat Produk untuk Sarana Produk Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase penerbitan sertifikat Produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Kelas I		100%	11.309.000		Persentase penerbitan sertifikat Produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Kelas I		100%	11.309.000		-	100%	-
1	2	4	02.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Kelas I dan PKRT yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	11.309.000	DBHM	Jumlah sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Kelas I dan PKRT yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	11.309.000	DBHM	-	1 dokumen	

KODE REKENING				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025																					
								Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2024																											
				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana																	
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
RSUD DR. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO												398.503.043.197												393.068.486.786															
1	2	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota				Persentase SPW Rumah sakit yang mencapai target				91,56%		334.238.202.240				Persentase SPW Rumah sakit yang mencapai target				91,56%		346.660.267.798															
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				Jumlah jenis pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang disediakan				RSUD Sosodoro Djatikoesoemo		99%		334.238.202.240				Jumlah jenis pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang disediakan				RSUD Sosodoro Djatikoesoemo		99%		348.660.267.798											
								Persentase SDM yang ditingkatkan kapaletasnya				45,50%						Persentase SDM yang ditingkatkan kapaletasnya				45,50%																	
1	2	1	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				RSUD Sosodoro Djatikoesoemo		334.238.202.240				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						346.660.267.798															
1	2	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota				Persentase layanan umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan						64.263.840.967				Persentase layanan umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan						46.408.218.988															
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah				Persentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan				RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo		64.263.840.967				Persentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan				RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo		46.408.218.988															
1	2	1	2.02	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				RSUD Sosodoro Djatikoesoemo		64.263.840.967				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						46.408.218.988															
RSUD PADANGAN												102.915.112.026												105.183.388.618															
1	2	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota				Persentase SPW Rumah sakit yang mencapai target				RSUD Padangan		91,56%		82.675.000.000				Persentase SPW Rumah sakit yang mencapai target				RSUD Padangan		91,56%		89.805.414.682											
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				Jumlah jenis pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang disediakan						100%		82.675.000.000				Jumlah jenis pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang disediakan						100%		89.805.414.682											
								Persentase SDM yang ditingkatkan kapaletasnya				80,50%						Persentase SDM yang ditingkatkan kapaletasnya				80,50%																	
1	2	1	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				RSUD Padangan		82.675.000.000				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						89.805.414.682															
1	2	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota				Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan				RSUD Padangan		100%		20.240.112.026				Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan				RSUD Padangan		100%		16.377.973.536											
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah				Persentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan						100%		20.240.112.026				Persentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan						100%		16.377.973.536											
1	2	1	2.02	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				RSUD Padangan		20.240.112.026				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						16.377.973.536															
RSUD SUMBERREJO												96.392.636.051												63.438.040.697															
1	2	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota				Persentase SPW Rumah sakit yang mencapai target						82.481.721.467				Persentase SPW Rumah sakit yang mencapai target						82.310.291.091															
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				Jumlah jenis pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang disediakan						82.481.721.467				Jumlah jenis pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang disediakan						82.310.291.091															
								Persentase SDM yang ditingkatkan kapaletasnya										Persentase SDM yang ditingkatkan kapaletasnya																					
1	2	1	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				RSUD Sumberjo		82.481.721.467				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						82.310.291.091															
1	2	2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																																			
1	2	2	02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota				Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan obat sesuai standar										Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan obat sesuai standar																					
								Persentase fasilitas kesehatan dengan akses sesuai standar										Persentase fasilitas kesehatan dengan akses sesuai standar																					
								Persentase fasilitas kesehatan dengan sarpras sesuai standar										Persentase fasilitas kesehatan dengan sarpras sesuai standar																					
1	2	2	02.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempai Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				RSUD Sumberjo				Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempai Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000																							
1	2	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota										13.910.914.584										11.127.748.806															
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah										13.910.914.584										11.127.748.806															
1	2	1	2.02	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				RSUD Sumberjo		13.910.914.584				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						11.127.748.806															

KODE REKENING				Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan							
				Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2024											
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
RSUD KEPOHBARU						49.584.469.285				48.226.471.611		(1.357.997.674)					47.131.611.056		
1	2	1		Program Penunjang Usuan Pemerintahan Kab/Kota	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	18.698.148.100				8.277.236.301				100%			18.215.289.871		
												(13.950.911.799)		100%			7.253.198.200		
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	9.706.054.429	RSUD KopoBaru			8.277.236.301									
												(4.428.818.128)					7.253.198.200		
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5.277.236.301									
												(4.428.818.128)		75%			8.962.093.671		
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		8.962.093.671	RSUD KopoBaru			0									
												(8.962.093.671)					8.962.093.671		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD KopoBaru			0									
												(8.962.093.671)					8.962.093.671		
1	2	2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	IKM	3,38	30.916.321.185	IKM		3,38	42.949.236.310		12.032.914.125	3,38			30.916.321.185		
1	2	2	3.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten / Kota yang disediakan sesuai standar	8.737.795.041	RSUD KopoBaru	75%		13.567.476.132	RSUD KopoBaru	75%	4.829.689.628	75%			20.551.103.328		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang layak fungsi			75%				75%	-	75%					
1	2	2	2.01	12	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Unit Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	RSUD KopoBaru	5 unit	DBHCHT, PAD, DBHM	Jumlah Unit Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	RSUD KopoBaru	5 unit	DBHCHT, PAD, DBHM	-	5 unit		489.032.700		
1	2	2	2.01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Unit Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	RSUD KopoBaru	14 unit	DBHCHT, PAD, DBHM	Jumlah Unit Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	RSUD KopoBaru	14 unit	DBHCHT, PAD, DBHM	-	14 unit		10.422.236.000		
1	2	2	2.01	14	pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Unit Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	RSUD KopoBaru	136 unit	DBHCHT, PAD, DBHM	Jumlah Unit Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	RSUD KopoBaru	136 unit	9.226.476.657	DBHCHT, PAD, DBHM	3.941.485.748	136 unit	5.254.314.628		
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan					225.973.800				-			220.000.000		
1	2	2	2.01	16	pengadaan obat, vaksin	Jumlah jenis Obat dan vaksin yang dilakukan diadakan	RSUD KopoBaru	2 paket	DBHCHT, PAD, DBHM	Jumlah jenis Obat dan vaksin yang dilakukan diadakan	RSUD KopoBaru	2 paket	DBHCHT, PAD, DBHM	-	2 paket		1.666.000.000		
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan habis pakai yang diadakan	RSUD KopoBaru	6 paket	DBHCHT, PAD, DBHM	Jumlah jenis bahan habis pakai yang diadakan	RSUD KopoBaru	6 paket	DBHCHT, PAD, DBHM	-	6 paket		1.500.000.000		
1	2	2	2.01	20	pemeliharaan rutin dan berkala/alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dilakukan pemeliharaan Rutin dan Berkala	RSUD KopoBaru	0 unit	DBHCHT, PAD, DBHM	Jumlah jenis Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dilakukan pemeliharaan Rutin dan Berkala	RSUD KopoBaru	0 unit	626.230.000	DBHCHT, PAD, DBHM	33.300.000	0 unit	990.520.000		
	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		2.333.870.895				3.186.794.675							
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai kebutuhan	RSUD KopoBaru	75%	22.178.635.581	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai kebutuhan	RSUD KopoBaru	75%	26.381.780.178	7.203.224.597	75%		10.365.217.869		
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD KopoBaru	75%	22.178.635.581	DBHCHT, PAD, DBHM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD KopoBaru	75%	26.381.780.178	DBHCHT, PAD, DBHM	7.203.224.597	75%	10.365.217.869	
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			0				0							
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2024							
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	15.984 orang	1.173.997.498	DAK Non Fisk	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	15.984 orang	1.173.997.498	DAK Non Fisk	-	15.984 orang	0
1	2	2	02.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	15.223 bayi		DAK Non Fisk	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	15.223 bayi		DAK Non Fisk	-	15.223 bayi	0
1	2	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	62.884 balita		DAK Non Fisk	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	62.884 balita		DAK Non Fisk	-	62.884 balita	1.070.205.240
1	2	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Puskemas	139.872 orang	494.995.000	DAK Non Fisk	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Puskemas	139.872 orang	494.995.000	DAK Non Fisk	-	139.872 orang	599.644.624
1	2	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	803.499 orang		DAK Non Fisk	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	803.499 orang		DAK Non Fisk	-	803.499 orang	205.046.120
1	2	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	198.428 orang		DAK Non Fisk	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	198.428 orang		DAK Non Fisk	-	198.428 orang	1.180.318.280
1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	368.371 orang		DAK Non Fisk	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	368.371 orang		DAK Non Fisk	-	368.371 orang	0
1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	23.445 orang		DAK Non Fisk	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskemas	23.445 orang		DAK Non Fisk	-	23.445 orang	0
1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskemas	2.518 orang		DAK Non Fisk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskemas	2.518 orang		DAK Non Fisk	-	2.518 orang	253.700.000
1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Puskemas	13.914 orang	154.834.400	DAK Non Fisk	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Puskemas	13.914 orang	154.834.400	DAK Non Fisk	-	13.914 orang	206.657.200
1	2	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Puskemas	20.712 orang	5.625.000	DAK Non Fisk	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Puskemas	20.712 orang	5.625.000	DAK Non Fisk	-	20.712 orang	57.384.625
1	2	2	02.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	-	35 dokumen	0
1	2	2	02.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi bencana Sesuai Standar	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	-	35 dokumen	36.800.000
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskemas	35 dokumen	5.575.084.286	DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskemas	35 dokumen	5.575.084.286	DAK Non Fisk	-	35 dokumen	2.806.985.830
1	2	2	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	-	35 dokumen	654.861.647
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskemas	35 dokumen	380.706.077	DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskemas	35 dokumen	380.706.077	DAK Non Fisk	-	35 dokumen	337.025.000
1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	-	35 dokumen	1.920.361.480
1	2	2	02.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	-	35 dokumen	0
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskemas	35 dokumen	870.139.264	DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskemas	35 dokumen	870.139.264	DAK Non Fisk	-	35 dokumen	138.415.326
1	2	2	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Puskemas	4200 orang		DAK Non Fisk	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Puskemas	4200 orang		DAK Non Fisk	-	4200 orang	0
1	2	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Puskemas	1 orang		DAK Non Fisk	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Puskemas	1 orang		DAK Non Fisk	-	1 orang	179.829.500
1	2	2	02.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Puskemas	1 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Puskemas	1 dokumen		DAK Non Fisk	-	1 dokumen	0
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskemas	35 dokumen	4.484.941.680	DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskemas	35 dokumen	4.484.941.680	DAK Non Fisk	-	35 dokumen	2.180.820.427
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	-	35 dokumen	0
1	2	2	02.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Puskemas	105 orang		DAK Non Fisk	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Puskemas	105 orang		DAK Non Fisk	-	105 orang	0
1	2	2	02.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Puskemas	60 paket		DAK Non Fisk	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Puskemas	60 paket		DAK Non Fisk	-	60 paket	29.925.000
1	2	2	02.02	29	Penyelinggangan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Puskemas	35 dokumen		DAK Non Fisk	-	35 dokumen	0
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskemas	35 dokumen	80.080.299.426	DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskemas	35 dokumen	84.756.263.575	DAK Non Fisk	4.675.965.149	35 dokumen	78.640.678.600
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskemas	35 dokumen	7.572.000	DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskemas	35 dokumen	7.572.000	DAK Non Fisk	-	35 dokumen	0
1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terserifikasi di Kabupaten/Kota	Puskemas			DAK Non Fisk	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terserifikasi di Kabupaten/Kota	Puskemas			DAK Non Fisk	-		0
1	2	2	02.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Puskemas	1 laporan	22.950.000	DAK Non Fisk	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Puskemas	1 laporan	22.950.000	DAK Non Fisk	-	1 laporan	25.925.000

KODE REKENING					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/Berkurang		Praktisitas Baru Rencana Tahun 2025	
							Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2024							
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	2	02.02	37	Peleaksanaan Kecepatan Dns dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kecepatan Dns dan Respon Wabah	Puskesmas	62 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kecepatan Dns dan Respon Wabah	Puskesmas	62 dokumen		DAK Non Fisk	-	52 dokumen	0
1	2	2	02.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terlembaga dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Puskesmas	1 unit		DAK Non Fisk	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terlembaga dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Puskesmas	1 unit		DAK Non Fisk	-	1 unit	0
1	2	2	02.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Menuju Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sube dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga Puskesmas	Puskesmas			DAK Non Fisk	Jumlah keluarga yang sube dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga Puskesmas	Puskesmas			DAK Non Fisk	-		0
1	2	2	02.02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas	2.861 orang	136.575.000	DAK Non Fisk	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas	2.861 orang	136.575.000	DAK Non Fisk	-	2.861 orang	164.786.530
1	2	2	02.02	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV(ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas	20.567 orang	38.925.000	DAK Non Fisk	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas	20.567 orang	38.925.000	DAK Non Fisk	-	20.567 orang	0
1	2	2	02.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malara	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malara Sesuai Standar	Puskesmas	1.267 orang		DAK Non Fisk	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malara Sesuai Standar	Puskesmas	1.267 orang		DAK Non Fisk	-	1.267 orang	34.131.000
1	2	2	02.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				467.030.000					467.030.000				
1	2	2	02.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak				2.117.852.800					2.117.852.800				
1	2	2	02.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				130.546.115					130.546.115				
1	2	2	02.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				130.546.115					130.546.115				
1	2	3			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar (jumlah dan kompetensi)	Puskesmas	49,18%		DAK Non Fisk	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar (jumlah dan kompetensi)	Puskesmas	49,18%		DAK Non Fisk	-	49,18%	-
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan terlatih	Puskesmas	50%		DAK Non Fisk	Persentase tenaga kesehatan terlatih	Puskesmas	50%		DAK Non Fisk	-	50%	-
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Puskesmas	650 orang		DAK Non Fisk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Puskesmas	650 orang	0	DAK Non Fisk	-	650 orang	0
1	2	5			Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Kelurahan Slaga Aktif Purnama dan Mandiri	Puskesmas	18%	1.067.465.908	DAK Non Fisk	Persentase Desa Kelurahan Slaga Aktif Purnama dan Mandiri	Puskesmas	18%	1.067.465.908	DAK Non Fisk	-	18%	867.895.843
						Persentase pondok pesantren yang memiliki Puskesmas		73%			Persentase pondok pesantren yang memiliki Puskesmas		73%			-	73%	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kamblraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Kelurahan Slaga yang difasilitasi	Puskesmas	100%	0	DAK Non Fisk	Persentase Desa Kelurahan Slaga yang difasilitasi	Puskesmas	100%	0	DAK Non Fisk	-	100%	0
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kamblraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kamblraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas	35 dokumen		DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kamblraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas	35 dokumen		DAK Non Fisk	-	35 dokumen	0
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa dengan Jumlah UKBM aktif > 4	Puskesmas	80%	1.067.465.908	DAK Non Fisk	Persentase Desa dengan Jumlah UKBM aktif > 4	Puskesmas	80%	1.067.465.908	DAK Non Fisk	-	80%	867.895.843
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas	35 dokumen	1.067.465.908	DAK Non Fisk	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas	35 dokumen	1.067.465.908	DAK Non Fisk	-	35 dokumen	867.895.843
TOTAL BIDANG							1.372.486.059.313				1.346.989.721.474		(25.496.337.839)			1.284.520.896.492		

Bojonegoro, Juli 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOJONEGORO



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tentunya memiliki tantangan/masalah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah rencana kerja tahun awal, dimana program dan kegiatan yang dituangkan di dalam RKPD merupakan penggalan dari Renstra OPD untuk tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD dimaksud dapat dilakukan perubahan di tahun berjalan berdasarkan ketentuan perubahan dokumen RKPD yang telah diatur didalam Permendagri tersebut dan Perubahan RKPD Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Sehubungan dengan ini maka Dinas Kesehatan juga menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2024.

Berdasarkan hasil review, terdapat perbedaan antara Renja tahun 2024 dengan Renja Perubahan tahun 2024 terutama dalam konsep tujuan, strategi dan kebijakan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Dan pada akhir tahun anggaran 2024 akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Namun demikian proses pembangunan tetap berjalan sebagaimana terjadinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 (APBD-P 2024).

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, sebagai Pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan

dan Program Kegiatan Tahun 2024. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kesehatan baik di Dinas Kesehatan, RSUD maupun puskesmas. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Kesehatan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atau kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi yang perlu perhatian khusus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Renja Perubahan Dinas Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro disusun dengan memperhatikan perubahan situasi dan pendapatan daerah serta masukan dari berbagai pihak, lintas sektor, masyarakat, mitra kesehatan dan kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun berjalan sampai triwulan II.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun, semoga semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik

sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik.

4.1 Catatan Yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Meningkatkan kesehatan ibu

Kesehatan ibu masih menjadi isu strategis nasional bahkan global. Angka Kematian Ibu Kabupaten Bojonegoro walaupun sudah mencapai target nasional dan SDG's, tetapi tetap perlu mendapat perhatian karena kematian seorang ibu akan berdampak kepada kelangsungan hidup penerus bangsa.

2. Penanggulangan penyakit menular

Pada penyakit menular, Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi masalah HIV-AIDS, DBD, Tuberculosis yang perlu mendapatkan perhatian.

3. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Saat ini terjadi pergeseran epidemiologi penyakit dimana PTM menduduki rangking tertinggi menggeser penyakit menular. Penyakit tidak menular banyak diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak menjalankan pola hidup sehat. Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor sangat diperlukan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan kesehatan terutama PTM yang saat ini telah dicanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama di daerah-daerah dengan kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang serta ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang belum merata. Kualitas pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan di

era Jaminan Kesehatan Nasional ini yang menuntut fasilitas kesehatan baik ditingkat primer maupun di tingkat lanjutan untuk menjadi lebih baik.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan setelah DPA disetujui dan disahkan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan pada awal tahun agar sesuai jadwal dan tepat waktu.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan Tahun 2024. Semoga upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini dapat lebih terarah dan terukur.

Kami menyadari, dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, maka kritik serta saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja (Renja) mendatang.

Bojonegoro, Juli 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOJONEGORO


dr. ANI PUJININGRUM, M. Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197391008 200312 2 006